

SEJARAH KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

NO	TAHUN	MUNAS/MUNASLUB/MUNASSUS/PERIHAL	KETERANGAN
1	1863	Dekret Gubernur Jenderal Hindia Belanda	Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mengeluarkan Dekrit Pembentukan Kamers van Kophandel en Nijverheid in Nederlandsch Indie (Kamar Dagang dan Handikraft Hindia Belanda).
2	1905	K.H. Samanhudi, mendirikan Sarikat Dagang Islam (SDI) tanggal 16 Oktober 1905 di Solo	Sjarikat Dagang Islam (SDI) merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia, yang fungsinya sama dengan fungsi sebuah kamar dagang.
3	1906	Kongres pertama Sarikat Dagang Islam (SDI) di Solo tahun 1906	kongres pertama Sarikat Dagang Islam (SDI) di Solo tahun 1906, namanya diganti menjadi Sarikat Islam, H.O.S. Tjokroaminoto pada tanggal 10 September 1912, membuat Sarikat Islam sebagai Badan Hukum dengan Anggaran Dasar Sarikat Islam (SDI) terdiri dari 15 pasal pada notaris B. ter Kuile di Solo, kemudian mendapatkan pengakuan dan disahkan oleh Pemerintah Belanda pada tanggal 14 September 1912.
4	1945	Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945	
5	1949	Pembentukan Dewan Ekonomi Indonesia Pusat (DEIP)	Pembentukan Dewan Ekonomi Indonesia Pusat (DEIP) yang menjadi wadah seluruh organisasi dunia usaha di Indonesia
6	1950	Asosiasi industri sektoral mulai terbentuk	Berbagai asosiasi industri sektoral mulai terbentuk, seperti Dewan Asuransi Indonesia (DAI), Perhimpunan Bank-bank Swasta Nasional (Perbanas), dan Perserikatan Usaha Grafika Nasional Indonesia yang kini dikenal sebagai Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI). Asosiasi-asosiasi ini berperan dalam mewakili kepentingan sektor masing-masing dan berkontribusi pada pengembangan industri terkait.
7	1956	Pembentukan Dewan dan Majelis Perniagaan dan Perusahaan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1956 tanggal 14 Maret 1956	Pembentukan Dewan dan Majelis Perniagaan dan Perusahaan, bahwa untuk kepentingan perkembangan ekonomi Indonesia sangat dibutuhkan organisasi- organisasi yang membantu Pemerintah khusus dalam mengatur dunia perniagaan dan perusahaan sehingga dapat sejalan dengan maksud pembangunan Negara serta pula menjamin bahwa pembinaan Pemerintah dapat dijalankan lebih lancar
8	1959	Manifesto Politik (Manipol) Republik Indonesia, dideklarasikan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1959	Manifesto Politik (Manipol) Republik Indonesia dideklarasikan pada 17 Agustus 1959 oleh Presiden Soekarno menjadi dasar ideologis yang mengarahkan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial Indonesia pasca-1959.

			menjadi landasan dari USDEK (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia). Ekonomi Terpimpin, Nasionalisasi Aset-Asing, Perencanaan Terpusat, Redistribusi Kekayaan, Pembangunan Nasional yang Mandiri.
9	1964	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964, tanggal 10 Pebruari 1964	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1964, tentang Badan Musyawarah Pengusaha Nasional (BAMUNAS)
10	1967	Keppres Nomor 84 Tahun 1967, 15 Juni 1967	Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1967, tentang Pembubaran Badan Musyawarah Pengusaha Nasional (BAMUNAS) dan memberi kebebasan pada dunia usaha untuk membentuk organisasinya.
11	1967-1968	Musyawarah Pembentukan Kamar Dagang dan Industri Jakarta (Kadin Jaya) tanggal 29-30 November 1967	Atas prakarsa Gubernur DKI Jakarta, diselenggarakan Musyawarah Pembentukan Kamar Dagang dan Industri Jakarta (Kadin Jaya) tanggal 29-30 November 1967. Kadin Jaya dikukuhkan Gubernur DKI Jakarta tanggal 8 Januari 1968 dengan Ketua Umum Sjamsuddin Mangan dan langsung ditunjuk sebagai penyelenggara Pekan Raya Jakarta (Jakarta Fair) pertama tahun 1968. Pembentukan Kadin Jaya diikuti dengan pembentukan Kadin di delapan provinsi lainnya.
12	1968-1972	Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dibentuk pada tanggal 24 September 1968, berdasarkan Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Pertama tanggal 23-24 September 1968 di Jakarta.	Delapan Kadin provinsi dan lima Kadin persiapan atas prakarsa Kadin Jaya dan didukung oleh 17 organisasi ekonomi/pengusaha tingkat nasional mengadakan Musyawarah Pembentukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tanggal 23-24 September 1968. Brigadir Jenderal TNI (Purn) Usman Ismail Terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Amaludin Ganie, Kadin Indonesia Periode 1968-1972
13	1972-1973	Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kedua tanggal 27-28 Maret 1972 di Jakarta	Brigadir Jenderal TNI (Purn) Sofyar terpilih menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Amaludin Ganie, Kadin Indonesia Periode 1972-1973
14	1973-1976	Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri 14 Mei 1973, (dikarenakan Ketum terdahulu meninggal dunia)	Marsekal TNI (Purn) Soewoto Sukendar terpilih menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Amaludin Ganie, Kadin Indonesia Periode 1973-1976
15	1973	Hasil Kepengurusan Ketum Kadin Marsekal TNI (Purn) Soewoto Sukendar	Terbit Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 49 Tahun 1973, 26 Desember 1973 yang mengukuhkan Kadin sebagai wadah dunia usaha di Indonesia.

16	1976-1979	Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Ketiga 27-29 Oktober 1976	Marsekal TNI (Purn) Soewoto Sukenda terpilih kembali menjadi Ketua Umum dan Sekreatris Jenderal Drs. Susdam Djamhari, Kadin Indonesia Periode 1976-1979
17	1979-1982	Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Keempat 27-29 September 1979, di Denpasar, Bali	DR. H.M.N.M Hasyim Ning terpilih menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Ali Noor Luddin, Kadin Indonesia Periode 1979 – 1982
18	1982-1985	Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Kelima 22-24 September 1982, di Jakarta	DR. H Sukamdani Sahid Gito Sardjono terpilih menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 1982-1985 dan 1985-1988
19	1983	Hasil Kepengurusan Ketum Kadin DR. H Sukamdani Sahid Gito Sardjono	Organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) masuk dalam GBHN 1983-1988 sebagai mitra pembinaan dunia usaha Indonesia
20	1985-1988	Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Keenam 27-29 September 1985, di Jakarta	DR. H Sukamdani Sahid Gito Sardjono terpilih menjadi Ketua Umum dan dan Sekretaris Jenderal Mayjen Soekamto Sajidiman, Bc.Hk., Kadin Indonesia Periode 1985-1988
21	1987	Hasil Kepengurusan Ketum Kadin DR. H Sukamdani Sahid Gito Sardjono 28 Januari 1987	Terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 28 Januari 1987
22	1988	Musyawarah Nasional Pengusaha Indonesia 24 September 1987, di Jakarta,	Menetapkan Anggaran Dasar Kadin sesuai Undang-Undang No. 1 Tahun 1987, disetujui dengan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 1988, 28 Januari 1988
23	1988-1993	Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Pertama (berdasarkan Undang-Undang No. 1/1987), 16-17 Desember 1988, di Jakarta	Ir. Sotion Ardjanggi terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Ir. Ibnoe Soedjono, Kadin Indonesia Periode 1988-1993
24	1994-1998	Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Kedua (berdasarkan Undang-Undang No. 1/1987), 11-13 Januari 1994, di Jakarta	Ir. Aburizal Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Ir. Iman Sucipto Umar, Kadin Indonesia Periode 1988-1993
25	1994	Musyawarah Nasional Khusus Kadin pada tanggal 7 Juni 1994 di Jakarta	Keputusan Presiden Nomor 97Tahun 1996 tanggal 20 Desember1996 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri
26	1998-2004	Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Ketiga (berdasarkan Undang-Undang No. 1/1987), 8-10 Desember 1998, di Jakarta	Ir. Aburizal Bakrie terpilih kembali sebagai Ketua Umum, Kadin Indonesia Periode 1998-2003
27	1999	Musyawarah Nasional Khusus Kadin tanggal 30 November 1999 di Jakarta	Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2000 tanggal 8 Mei 2000 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri

28	2002	Logo dan nama Kadin Indonesia terdaftar, 17 April 2002	Pada 17 April 2002, Logo dan nama Kadin Indonesia telah didaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI dengan pemegang Hak Cipta : Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). (Masa berlaku 50 Tahun sejak pertama kali diumumkan 17 April 2002). Nomor dan tanggal pendaftaran : 022395.
29	2003	Musyawarah Nasional Khusus Kadin tanggal 17 Desember 2003 di Jakarta	Keputusan Presiden No. 14 tahun 2004 tanggal 18 Februari 2004 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri
30	2004-2009	Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Keempat (berdasarkan Undang-Undang No. 1/1987), 19-20 Februari 2004, di Jakarta	M. S. Hidayat terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2004-2009
31	2005	Musyawarah Nasional Khusus Kadin tanggal 8 Juni 2005 di Jakarta	20 Oktober 2005 Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Negara meminta dihapus kalimat pada AD/ART hasil Munassus Kadin 2005 pasal 43 ayat 2 yang berbunyi : “.....dan untuk selanjutnya Perubahan Anggaran Dasar tidak perlu disetujui dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
32	2006	Musyawarah Nasional Khusus Kadin tanggal 8 Maret 2006 di Jakarta	Keputusan Presiden No. 16 tahun 2006 tanggal 9 September 2006 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri
33	2008	Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Kelima (berdasarkan Undang-Undang No. 1/1987), 21-22 Desember 2008, di Jakarta	M. S. Hidayat terpilih kembali sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2008-2013
34	2010	Musyawarah Nasional Khusus Kadin tanggal 25 April 2010 di Jakarta	Keputusan Presiden No. 17 tahun 2010 tanggal 23 Agustus 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri
35	2010	Pergantian Antar Waktu Ketua Umum Kadin Indonesia	Pada tanggal 24 Mei 2010 terjadi Pergantian Antar Waktu Ketua Umum Kadin Indonesia M.S. Hidayat karena mendapat tugas Negara menjadi Menteri Perindustrian R.I. digantikan oleh Adi Putra Tahir sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia untuk masa bakti 2010.
35	2010-2015	Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Keenam (berdasarkan Undang-Undang No. 1/1987), 24-26 September 2010, di Jakarta	Suryo Bambang Sulisto terpilih terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2010 – 2015

37	2011	Terbit Sertifikat Merek KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA tanggal 19 Juni 2011	Pada tanggal 19 Juni 2011, Sertifikat Merek : KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA telah di terbitkan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. dengan pemilik Merek : Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Menara Kadin Indonesia, Lt. 29, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 2-3, Jakarta 12950. Masa berlaku 10 Tahun sejak tanggal Penerimaan : 19 Juni 2011. No. Pendaftaran : IDM000267151.
38	2015-2021	Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Ketujuh (berdasarkan Undang-Undang No. 1/1987), 22-24 November 2015, di Bandung Jawa Barat	Rosan Perkasa Roeslani terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2015 – 2021
39	2021-2024	Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Kedelapan (berdasarkan Undang-Undang No. 1/1987), 30 Juni-2 Juli 2021, di Kendari Sulawesi Tenggara	Arsjad Rasjid terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2021-2026
40	2022	Musyawarah Nasional Khusus Kadin tanggal 23 Juni 2022 di Banten	Keputusan Presiden No. 18 tahun 2022 tanggal 21 September 2022 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri
41	2024-2029	Musyawarah Nasional Luar Biasa/Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Kesembilan (berdasarkan Undang-Undang No. 1/1987), 14 September 2024, di Jakarta	Anindya N. Bakrie terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia Periode 2024-2029